



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ichsan Zulkarnaen

Jabatan : Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan
Hilirisasi



Ichsan Zulkarnaen

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi	1.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Rp635,89 Triliun
		1.2	Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	100%
2.	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	85%
3.	Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Total

(Satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah)

Anggaran

Rp. 1.728.026.000,-

Rp. 1.728.026.000,-

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan
Hilirisasi



Ichsan Zulkarnaen

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.1

Sasaran Kegiatan

SS.1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Peningkatan investasi yang berorientasi pada sektor hilirisasi merupakan salah satu sasaran kegiatan untuk mendorong realisasi penanaman modal pada industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi, mencakup penyederhanaan proses perizinan, optimalisasi insentif, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan regulasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor, baik domestik maupun asing. Dalam konteks ini, akselerasi hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

Deskripsi IKU

Definisi

Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi menurut BKPM merujuk pada jumlah investasi yang telah direalisasikan dalam bidang hilirisasi. Bidang hilirisasi sendiri merupakan industri pengolahan sumber daya alam yang terbagi menjadi beberapa sektor komoditas antara lain mineral dan batubara, minyak dan gas, serta perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Bidang Hilirisasi ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena merupakan prioritas strategis nasional yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi melalui transformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produk olahan. Penetapan ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2025-2029 yang menekankan pada penguatan daya saing industri, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan negara.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah dengan deregulasi kebijakan kemudahan berusaha melalui evaluasi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan revisi peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Deregulasi kebijakan yang diharapkan dapat mempermudah proses bisnis penerbitan izin usaha dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Formula

Total nilai investasi realisasi = \sum (Investasi PMA + Investasi PMDN) dalam bidang hilirisasi

Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** yang disampaikan oleh perusahaan PMA dan PMDN setiap triwulan

Tujuan
Memberikan gambaran terhadap pencapaian investasi serta mengevaluasi efektivitas investasi yang benar-benar terealisasi, bukan hanya yang telah disetujui dalam komitmen awal. Selain itu, data ini sebagai dasar untuk menetapkan strategi investasi, menyesuaikan kebijakan fiskal dan mengoptimalkan perizinan bagi investor.

Satuan Pengukuran

Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM
--

Pejabat Penanggung Jawa Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi
--

Sumber Data

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)/ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
--

Tingkat Kendali IKU

<input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Moderate	<input checked="" type="checkbox"/> Low
-------------------------------	-----------------------------------	---

Tingkat Validitas IKU

<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
---	--------------------------------	-----------------------------------

Jenis Konsolidasi Periode

<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
------------------------------	----------------------------------	---

Jenis Cascading IKU

<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
--	---	--

Metode Cascading

<input checked="" type="checkbox"/> Direct	<input type="checkbox"/> Indirect
--	-----------------------------------

Polarisasi IKU

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	Rp 521,4 T	Rp 584,1 T	Rp 635,89 T
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

KODE IKU: 1.2

Sasaran Kegiatan

SS.1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Peningkatan investasi yang berorientasi pada sektor hilirisasi merupakan salah satu sasaran kegiatan untuk mendorong realisasi penanaman modal pada industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi, mencakup penyederhanaan proses perizinan, optimalisasi insentif, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan regulasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor, baik domestik maupun asing. Dalam konteks ini, akselerasi hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

Deskripsi IKU

Definisi

Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 merujuk kepada jumlah regulasi dan instrumen pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang berhasil diundangkan dan/atau terselesaikan. Regulasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa yang terkait dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam menjalankan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam penyusunan instrumen pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 (penyelesaian peraturan menteri/kepala badan mengenai standar kegiatan usaha) perlu dipastikan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dirumuskan sejalan dengan tata cara perizinan yang tercantum dalam Lampiran I dan II PP 28 Tahun 2025. Penyelesaian regulasi-regulasi dan instrumen pelaksanaan ini akan menjadi panduan detail bagi pelaku usaha dan pemroses perizinan di Pusat dan Daerah dalam menjalankan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Formula

Persentase penyelesaian regulasi dan instrumen pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dihitung berdasarkan seberapa banyak jumlah regulasi dan instrumen pelaksana PP 28/2025 yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah regulasi dan instrumen pelaksana PP 28/2025 yang ditargetkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase penyelesaian regulasi dan sistem pelaksanaan PP 28/2025 di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi:

Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025

$$= \frac{\text{Jumlah regulasi dan instrumen pelaksana yang terselesaikan}}{\text{Jumlah regulasi dan instrumen pelaksana yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Target tahun ini mencakup 4 regulasi dan instrumen pelaksana, dengan penetapan yang terintegrasi sesuai sektor dalam PP 28/2025. Adapun rincian dari 4 regulasi dan instrumen pelaksana tersebut adalah:

1. Sektor Perhubungan;
2. Sektor Kebudayaan;
3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Sektor Kelautan dan Perikanan.

Tujuan

Memberikan gambaran teknis terkait progres penyelesaian instrumen pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Sumber Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Tingkat Kendali IKU

(...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

KODE IKU: 2.1

Sasaran Kegiatan

SS.2.Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral yang menjalankan fungsinya sebagai:

- a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral;
- b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral;
- c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral;
- d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral antara lain:

1. Melakukan Identifikasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, serta pelaporan hasil evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha (PMA dan PMDN);
2. Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM;

3. Identifikasi Isu dan Kendala Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis non-Minerba;
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kemudahan Berusaha serta Perkembangan Investasi Hilirisasi Komoditas Strategis non-Minerba.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/ Peraturan Pemerintah/ Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

1. Undangan Rapat dan Daftar Hadir Pembahasan Kebijakan terkait Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi;
2. Notula Rapat Pembahasan Permasalahan Perizinan Berusaha di Indonesia; dan
3. Notula Rapat Pembahasan Percepatan Hilirisasi Komoditas Strategis.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang Strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

1. Undangan Rapat, Daftar Hadir, dan Notula Rapat Penyusunan atau Pembahasan Rancangan Kebijakan; dan
2. Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif Kebijakan Perizinan Berusaha dan Akselerasi Investasi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/ Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rancangan Kebijakan (RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko, RPermen) terkait Perizinan Berusaha dan Akselerasi Hilirisasi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang Strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

1. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Perizinan Berusaha dan Akselerasi Hilirisasi; dan
2. Dokumen Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha dan Akselerasi Hilirisasi.

Formula

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat}$$

Tujuan

Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Kemudahan Berusaha dan Akselerasi Hilirisasi.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Sumber Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....)Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	80%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI**

KODE IKU: 3.1

Sasaran Kegiatan

SS.3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral ; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral ; dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Deskripsi IKU

Definisi
<p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Selain Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey yang dilakukan adalah survey skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilaksanakan di tiap semester dengan menggunakan <i>Google Form</i>.</p>
Formula
<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Selain Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $ \text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right) $
Tujuan
<p>Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Percepatan Investasi dan Hilirisasi Selain Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
Tingkat Kendali IKU	(...) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (X) Triwulanan (..) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3,67	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,59	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,75	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI**

KODE IKU: 4.1

Sasaran Kegiatan

SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran kegiatan. Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Deskripsi IKU

Definisi										
<p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sebagai berikut:</p>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Inisiatif Strategis</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">TW 1</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">TW 2</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">TW 3</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">TW 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: left;">Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi</td> <td style="padding: 5px; text-align: left;"> 1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU 2. Penyusunan Laporan Kinerja TW 1 3. Optimalisasi Pemanfaatan </td> <td style="padding: 5px; text-align: left;"> 5. Penyusunan Laporan Kinerja TW 2 6. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 2 7. Penyusunan Revisi Renja 2026 </td> <td style="padding: 5px; text-align: left;"> 10. Penyusunan Laporan Kinerja TW 3 11. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 3 12. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP </td> <td style="padding: 5px; text-align: left;"> 14. Penyusunan Laporan Kinerja TW 4 15. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 4 </td> </tr> </tbody> </table>	Inisiatif Strategis	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU 2. Penyusunan Laporan Kinerja TW 1 3. Optimalisasi Pemanfaatan	5. Penyusunan Laporan Kinerja TW 2 6. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 2 7. Penyusunan Revisi Renja 2026	10. Penyusunan Laporan Kinerja TW 3 11. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 3 12. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP	14. Penyusunan Laporan Kinerja TW 4 15. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 4
Inisiatif Strategis	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU 2. Penyusunan Laporan Kinerja TW 1 3. Optimalisasi Pemanfaatan	5. Penyusunan Laporan Kinerja TW 2 6. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 2 7. Penyusunan Revisi Renja 2026	10. Penyusunan Laporan Kinerja TW 3 11. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 3 12. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP	14. Penyusunan Laporan Kinerja TW 4 15. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 4						

	SRIKANDI TW 1 4. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	8. Penyusunan RENJA 2027 9. Penyusunan TOR dan RAB	13. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	
--	---	---	---	--

Formula

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi/ Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Sumber Data

Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

Tingkat Kendali IKU

High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU

Exact Proxy Activity

Jenis Konsolidasi Periode

Sum Average Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

Cascading Peta Cascading Non Peta Non-Cascading

Metode Cascading

Direct Indirect

Polarisasi IKU

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	66%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN INVESTASI DAN HILIRISASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	635,89 T	Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2025. • Rapat Koordinasi Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi: Keberlanjutan Investasi Komoditas Perikanan di Danau Toba. • Monev Kebijakan Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Dalam Rangka Upaya Substitusi Impor Produk Turunan Rumput Laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Triwulan I Tahun 2026: Capaian dan Hambatan. • Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map Hilirisasi Rumput Laut Tahun 2025 dan Triwulan I 2026. • Koordinasi Monitoring Penyelesaian Hambatan Investasi Komoditas Tilapia dan komoditas lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Triwulan II Tahun 2026: Capaian dan Hambatan. • Koordinasi Monitoring Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi: Keberlanjutan Investasi Komoditas Ikan Tilapia di Danau Toba • Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Triwulan III Tahun 2026: Capaian dan Hambatan. • Koordinasi Monitoring Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi Komoditas Strategis: Perikanan, Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan. • Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> • Monev Kebijakan Hilirisasi Komoditas Garam sebagai bahan baku dan bahan penolong produk farmasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Keberlanjutan Investasi Komoditas Strategis (Perikanan, Rumput Laut, dan lainnya). • Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi untuk pilar: Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi Triwulan I tahun 2026. • Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas Rumput Laut (KUR, BLU dan LPDB) triwulan I tahun 2026. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi Rumput Laut Triwulan II 2026. • Monitoring Hambatan Investasi Komoditas Strategis (Perikanan, Rumput Laut, dan lainnya). • Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi untuk pilar: Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi Triwulan II tahun 2026. • Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Road Map Hilirisasi Rumput Laut Triwulan III 2026. • Monitoring Perkembangan Investasi Komoditas Strategis (Perikanan, Rumput Laut, dan lainnya). • Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi untuk pilar: Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi Triwulan III tahun 2026. • Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
							Komoditas Rumput Laut (KUR, BLU dan LPDB) triwulan II tahun 2026.	Pengembangan Komoditas Rumput Laut (KUR, BLU dan LPDB) triwulan III tahun 2026.
		Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	100%	Koordinasi Deregulasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Penghimpunan Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha. • Rapat Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pada sektor kelautan dan perikanan. • Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah. • Penyusunan Draft Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah. • Koordinasi Penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. • Monitoring dan Evaluasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Penyelesaian Substansi Penyempurnaan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha (Penanaman PP 28/2025, Permen/Perka pasa Sistem OSS). • Koordinasi Penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor kelautan dan perikanan serta energi dan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko untuk sektor kelautan dan perikanan; sektor energi dan sumber daya mineral; sektor keagamaan; sektor lingkungan hidup, dan subsektor keamanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor perhubungan dan sektor kebudayaan. 	<p>Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan Pelaku Usaha.</p>	<p>Penanaman Modal (Perpres BUPM).</p>	<p>sumber daya mineral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	85%	Pengendalian Implementasi Pelaksanaan Berusaha Dapat Ditindaklanjuti oleh K/L dan Daerah terkait	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Identifikasi Kendala Implementasi Pelaksanaan Berusaha dengan Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN). Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permen dan Perka turunan PP 28/2025 dan penyempurnaan sistem OSS. Penyusunan Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait Revisi Revisi Perpres BUPM. Melakukan Identifikasi Awal Isu dan Kendala Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis non- 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Koordinasi dan Penyelesaian atas Kendala Berusaha dengan Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN). Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permen dan Perka turunan PP 28/2025 dan penyempurnaan sistem OSS. Rapat Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM. Monev Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Persyaratan Investasi (Implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN), K/L dan Daerah. Rapat Koordinasi Penyusunan Permen/Perka Turunan PP 28 Tahun 2025. Rapat Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM (Finalisasi tingkat Eselon I). Rapat Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Perpres BUPM (Harmonisasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN), K/L dan Daerah. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanaman PP 28 Tahun 2025 serta Permen/Perka pada Sistem OSS Penetapan dan Sosialisasi Perpres BUPM Monev Kebijakan Kemudahan Berusaha (Implementasi PP 28/2025, Permen/Perka pada Sistem OSS)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>ESDM dan non-Migas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengumpulan Data Awal terkait Realisasi Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut. 	<p>Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 tahun 2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi perubahan KBLI dan kaitannya dengan implementasi PP 28/2025. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Tindak Lanjut Pengembangan Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Bernilai Tambah, Khususnya terkait Investasi dan Pembiayaan. Pemutakhiran Data Realisasi Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Monev Kebijakan Kemudahan Berusaha Sosialisasi perubahan KBLI dan kaitannya dengan implementasi PP 28/2025. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Bernilai Tambah. Melakukan Analisis Data Realisasi Investasi Hilirisasi non-ESDM dan non-Migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi dan Monitoring Kajian Daya Dukung Danau Toba terhadap Hilirisasi Ikan Tilapia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pelaksanaan Kajian direncanakan mulai tahun 2026). Monitoring Hilirisasi Rempah Pasca Peluncuran Roadmap Hilirisasi Rempah atau komoditas hilirisasi strategis lainnya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3	Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	3 dari 4 (Baik)	Peningkatan kepuasan layanan KSP melalui deregulasi peraturan penanaman modal, penyelesaian hambatan investasi, serta penguatan keberlanjutan usaha di bidang hilirisasi oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di bidang percepatan investasi dan hilirisasi TW 1	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di bidang percepatan investasi dan hilirisasi TW 2	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di bidang percepatan investasi dan hilirisasi TW 3	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di bidang percepatan investasi dan hilirisasi TW 4
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	92%	Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja TW 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja TW 2 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 2 • Penyusunan Revisi Renja 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja TW 3 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja TW 4 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> •Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW 1 •Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RENJA 2027 • Penyusunan TOR dan RAB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko 	

Jakarta, 31 Januari 2026
Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi



Ichsan Zulkarnaen, M.Sc., Ph.D
NIP 197208291997031001